

**IMPLEMENTASI PROGRAM PAKET C SETARA SMA  
DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KABUPATEN KARANGANYAR**



**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata II  
Pada Jurusan Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Suwanto  
Q 100140168

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM PAKET C SETARA SMA  
DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KABUPATEN KARANGANYAR**

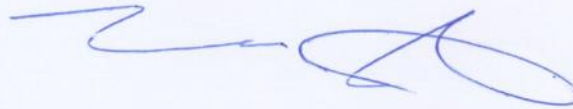
**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh

Suwanto  
**Q100140168**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Sutama, M.Pd.**

## PENGESAHAN

### ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PAKET C SETARA SMA DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh :

**SUWANTO**  
**Q100140168**

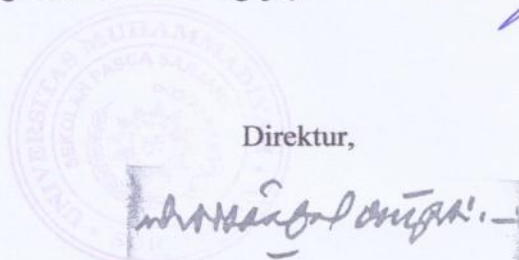
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Program Studi Magister Administrasi Pendidikan  
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 8 Agustus 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Prof. Dr. Sutama, M.Pd**  
( Ketua Dewan Penguji )
2. **Dr. Sumardi, M.Si**  
( Anggota I Dewan Penguji )
3. **Dr. Djalal Fuadi, M.M**  
( Anggota II Dewan Penguji )



Direktur,



**Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati.**

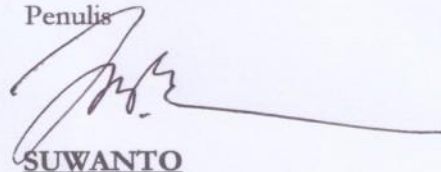
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Juli 2016

Penulis



SUWANTO

Q100140168

# IMPLEMENTASI PROGRAM PAKET C DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KARANGANYAR

oleh

**Suwanto<sup>1</sup>, Utama<sup>2</sup>, dan Sumardi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>.Mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan UMS

<sup>2,3</sup> Staf Pengajar Pascasarjana UMS

[Suwanto67@gmail.com](mailto:Suwanto67@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) implementasi Standar isi,(2) implementasi Standar Kompetensi Lulusan , (3) implementasi Standar Proses, (4) implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) implementasi Standar Pengelolaan Program Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Karanganyar,. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, dengan model kesenjangan menunjukkan hasil bahwa : (1) terdapat kesenjangan implementasi Standar Isi pada sub komponen pendukung dokumen KTSP indikator dasar penyusunan dokumen KTSP dan dokumen KTSP, (2) terdapat kesenjangan implementasi Standar Kompetensi Lulusan pada sub komponen KKM indikator kelengkapan dokumen penetapan KKM, KKM per mata pelajaran, dan dokumen penetapan kriteria kelulusan UPK, (3) terdapat kesenjangan implementasi Standar Proses pada sub komponen perencanaan pembelajaran indikator RPP bentuk pembelajaran, dokumen kontrak belajar, sub komponen pelaksanaan pembelajaran pada indikator pelaksanaan pembelajaran tatap muka,tutorial , dan mandiri, sub komponen pengawasan proses pembelajaran pada indikator program pemantauan, supervise oleh penyelenggara, dan supervise oleh penilik, (4) terdapat kesenjangan pada implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sub komponen pendidik pada indikator kualifikasi akademik, kesesuaian latar belakang pendidik, dan sertifikat pelatihan tutor, sub komponen tenaga kependidikan pada indikator sertifikat pelatihan pengelola, (5) terdapat kesenjangan pada implementasi Standar Pengelolaan pada sub komponen perencanaan program indikator dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah, dan muatan rencana kerja tahunan.

**Kata kunci** : implementasi, model kesenjangan, standar pendidikan.

## Abstract

The aim of the research to analyse : (1). the implementation of content standar, (2). the implementation of graduation of competition standar, (3) the implementation of process standar, (4). the implementation of teacher and administrator standar, (5) the implementation of management standar of Package C program in Sanggar Kegiatan Belajar Karanganyar regency.Using qualitative method research and using descriptive qualitative analyse data with discrepancy model shows that : (1) there are discrepancies of implementation on content standar on proponent of Curriculum on Educational Items Level (CEIL) sub component in Curriculum on Educational Items Level (CEIL) document basis arranging and Curriculum on Educational Items Level (CEIL) document indicators. (2) there are discrepancies of implementation on graduation of competition standar on minimal completeness criteria on minimal completeness criteria sub component in completeness of minimal completeness criteria determining document, minimal completeness criteria each subject, and document of determining graduation criteria indicators. (3) there are discrepancies of process standar on Learning Implementation Design (LID) sub component in self learning model Learning Implementation Design (LID) indicator and sub component of learning implementation in face to face, tutorial, and self learning model,and learning contract indicators, on teaching process supervision in monitoring program, supervised by organizer, and supervised by inspector indicators, (4) there are discrepancies of implementation on teacher and administrator standar on teacher sub component in academic background, suitability of academic with subject teaching, and tutor training certificate, on administrator sub component in administrator training certificate indicators, (5) there are discrepancies of implementation on management standar on design program sub component in the middle period activity design and content of Annual Activity Design (AAD) indicator.

**Keywords** : discrepancy model, education standar, implementation

## **PENDAHULUAN**

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab VI tentang jalur jenjang dan jenis pendidikan ,pasal 13 ayat ( 1 ) dinyatakan bahwa proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal dan jalur pendidikan informal. Ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya, serta di selenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka atau melalui belajar jarak jauh.

Program paket C setara dengan SMA/MA adalah program pendidikan pada jalur nonformal/pendidikan luar sekolah yang ditujukan bagi setiap warga negara yang telah lulus/tidak lulus SMP/MI atau putus SMP karena berbagai keterbatasan.. Definisi mengenai setara adalah sepadan dalam civil effect, ukuran, pengaruh, fungsi dan kedudukan. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No 20 / 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 Ayat (6) bahwa " Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan."

Untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan program paket C setara SMA diperlukan suatu evaluasi untuk menganalisa sejauh mana penyelenggaraan program memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan agar mampu menghasilkan lulusan bermutu dan berdaya saing global.

Menurut A.Muri Yusuf (2015:146):

“Banyak program dalam bidang pendidikan telah dilaksanakan,baik dalam konteks tataran nasional maupun provinsi,kabupaten dan kota, yang melakukan assesmen dan evaluasi (yang) menyeluruh masih sangat terbatas. Bahkan timbul sinyalemen dalam masyarakat awam,bahwa program tersebut “sekedar mengejar proyek”.Dari sisi lain,sebenarnya telah dilakukan evaluasi oleh kelompok tertentu,tetapi hanya dalam batasan proyek selesai.Demikian juga untuk program paket A,Paket B dan paket C jarang yang menilai keterlaksanaan program secara utuh”.

Keberadaan Paket C sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu dalam pelaksanaanya, Paket C harus mengacu pada pemenuhan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar

pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar pengelolaan. Hal ini untuk mengeliminasi kesan bahwa program Paket C diselenggarakan secara asal-asalan.

Budi Raharjo (2014: 470-482), dalam penelitiannya menyatakan bahwa dari delapan standar yang ada, standar yang masih rendah adalah standar sarana dan prasarana, standar proses, standar kompetensi dan standar tenaga pendidik dan kependidikan. Implementasi delapan Standar Nasional Pendidikan terhadap prestasi belajar tidak terlalu signifikan yang berarti bahwa keberhasilan prestasi belajar ditentukan oleh faktor lain baik faktor internal maupun eksternal. Selanjutnya penelitian Lubis (2013), menyatakan bahwa Pendidikan adalah investasi manusia jika dikelola dengan baik dan benar maka akan berdampak pada kesejahteraan, usaha untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia adalah dengan ditetapkannya Standar Nasional Pendidikan, mekanisme akreditasi dan sertifikasi memerlukan instrument yang valid dalam rangka menjamin akuntabilitas publik yang baik, adil, dan jujur.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mendeskripsikan implementasi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar pengelolaan pada program paket C setara SMA di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Karanganyar.

## **METODE**

Jenis penelitian yang penulis laksanakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sutarna (2015:43) secara tipikal berkaitan erat dengan observasi partisipatoris, wawancara tidak terstruktur dan setengah terstruktur, kelompok-kelompok fokus, penelaahan teks kualitatif dan pelbagai teknik keabsahan seperti percakapan dan analisis wacana. Sedangkan menurut Molleong (2013:3), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati

Secara metodologis, penelitian ini termasuk penelitian evaluatif karena berorientasi pada analisis berdasarkan pendekatan evaluasi program yang berorientasi pada pengelolaan program yaitu gambaran yang menunjukkan prosedur dan proses pelaksanaan program, dan juga menganalisa kesenjangan program dengan indikator-indikator dari sub komponen pada setiap komponen standar nasional pendidikan dengan *Discrepancy Model* (Model Kesenjangan) yang dikonfirmasi dengan target sasaran yang merupakan standar suatu

program. Penelitian evaluatif pada dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa suatu obyek evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang diperoleh. Suharsimi Arikunto ( 2010: 37).

Model kesenjangan atau *discrepancy model* yang dikembangkan oleh Malcolm Provus (1966) menekankan pada pandangan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur besarnya kesenjangan yang ada pada setiap komponen. Suharsimi Arikunto ( 2008:48). Jika tidak terjadi kesenjangan antara kondisi real dengan standar, maka program tersebut dikatakan sangat efektif, sebaliknya bila terjadi kesenjangan yang tinggi maka program tersebut tidak efektif. Kesenjangan atau ketidaksesuaian dikelompokkan berdasarkan pasal kausal manajemen mutu ISO 9001: 2008 yaitu ketidaksesuaian mayor yang mempengaruhi kualitas program dan ketidaksesuaian minor yang tidak mempengaruhi kualitas program. Penelitian dilaksanakan pada program Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Karanganyar pada bulan Pebruari sampai dengan Juli 2016. Subyek penelitian adalah penyelenggara, pengelola, dan tutor Paket C.

Dalam rangka memperoleh data awal digunakan teknik angket atau kuesioner yang berbentuk pertanyaan tertulis dengan memilih jawaban pilihan ganda.. Bentuk angket yang digunakan adalah pilihan ganda majemuk (*multiple choice*), responden dapat diberikan opsi majemuk baik sebagai sebuah daftar jawaban-jawaban yang mempunyai ciri-ciri tersendiri atau berlainan (*discrete answer*) yang dapat dipilih sebagai dimensi atau skala dari suatu ekstrim ke ekstrim lainnya. Utama ( 2015:94-95 ). Sedangkan menurut Wirawan ( 2011:186) kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang harus dijawab responden secara tertulis. Selanjutnya untuk melengkapi data peneliti melakukan wawancara, pada kegiatan ini peneliti melakukan dialog atau tanya jawab kepada subyek penelitian secara langsung atau berhadap-hadapan, dalam hal ini peneliti memilih interview bebas sebagai alternatif mengenai hal-hal yang perlu ditanyakan di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran umum tentang implementasi standar nasional pada program Paket C. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon ( Sugiyono, 2006, : 138-140 )

Untuk menganalisis data yang lebih mendalam peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan observasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memverifikasi



jawaban yang diberikan nara sumber pada kuesioner. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen, arsip maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema evaluasi. Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, selanjutnya teknik observasi, tujuan observasi adalah untuk mencocokkan data hasil kuesioner dengan kenyataan di lapangan atau dokumen yang dimiliki obyek penelitian. Menurututama (2015:92) Observasi ialah menghimpun data informasi melalui pengamatan atau observasi (*observation*) dengan memperhatikan/melihat dan/atau mendengarkan orang atau peristiwa. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

Dalam evaluasi ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, kriteria atau standar yang digunakan adalah komponen-komponen yang ada pada standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar pengelolaan pendidikan program paket C. Sumber data utama evaluasi ini adalah hasil kuesioner sebagai instrument evaluasi yang disusun mulai dari komponen, sub komponen, dan indikator masing sub komponen. Indikator disusun dengan pertimbangan mengurutkan indikator dengan urutan prioritas yang akan menghasilkan kriteria kualitatif. Suharsimi Arikunto (2008:36).

Untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi pengumpulan data dan sumber yaitu mencocokkan hasil kuesioner atau angket dan wawancara dengan data observasi dan dokumentasi yang ada pada subyek. William Wiersma dalam Sugiyono (2013:372): *“Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses to a sufficiency of the data according to the convergence of multiple data collection procedurs”* dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis yakni; triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Standar Isi.**

#### **1.1. Pendukung dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)**

Dokumen KTSP disusun berdasarkan pemetaan Satuan Kredit Kompetensi (SKK) dan melakukan perhitungan beban belajar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

Pada kelengkapan struktur dan muatan KTSP tidak mencakup mata pelajaran muatan lokal sehingga jumlah SKK tidak mencapai 122 untuk seluruh tingkatan tidak sesuai dengan Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 Bab II.B tentang struktur kurikulum.

Dokumen KTSP disusun berdasarkan analisis kontek yaitu berpedoman pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum program paket A, Paket B, dan Paket C tetapi tidak ditanda tangani/ disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, tidak sesuai dengan lampiran Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 Pada Bab III.B, kenyataan ini didukung oleh pendapat Ismail Yuksel (2010:78-83) bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap realisasi dan implementasi pendidikan dasar dan juga membangun kurikulum yang lebih rinci sesuai dengan tujuan Dewan Pendidikan Nasional. Guru dan siswa diberikan keleluasaan untuk mengembangkan isi pendidikan dan memilih metode.

Hasil penelitian ini dapat dimaknai bahwa SKK adalah bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, dan merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran termasuk di dalamnya mata pelajaran muatan lokal yang merupakan kajian yang diberikan secara terintegrasi dalam mata pelajaran atau berdiri sendiri sebagai mata pelajaran pilihan.

#### **1.2. Dokumen Silabus.**

Telah memiliki panduan dan contoh silabus yang dikembangkan oleh pusat sebagai referensi dalam penyusunan silabus dan semua silabus dikembangkan secara mandiri untuk semua mapel dan tingkatan serta dikembangkan melalui

proses penjabaran SK/KD menjadi indikator, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran dan jenis penilaian seperti yang tercantum pada Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 Bab III.B, Kondisi di atas tidak sesuai dengan pendapat Lis Prasetyo ( 2009 : 1-12 ) yang menyatakan bahwa program pendidikan nonformal tidak memperhatikan transformasi nilai dalam pelaksanaannya. Pengabaian transformasi nilai menjadikan program tidak efektif, tidak memberikan dampak apapun terhadap warga belajar.

penelitian di atas dapat dimaknai bahwa Silabus merupakan penjabaran dari Standar Kompetensi (SK) dan diuraikan lagi menjadi Kompetensi Dasar (KD) mata setiap mata pelajaran, selanjutnya penjabaran indikator dan kegiatan pembelajaran menjadi tanggung jawab pendidik dalam mengembangkannya disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan peserta didik.

## 2. Implementasi Standar Kompetensi Lulusan.

### 2.1. Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM )

Penetapan KKM tidak dilengkapi dengan dokumen KKM yang disusun berdasarkan hasil analisis kompleksitas, intake, daya pendukung dan tidak disusun mulai dari KKM indikator, KKM SK, KKM KD, dan KKM mata pelajaran tetapi hanya disetujui dalam rapat penyelenggara dan tutor, tidak sesuai dengan ketentuan bahwa penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, intake, untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi, dan KKM permata pelajaran belum mencapai minimal 75 sesuai dengan target ketuntasan secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan jurnal Supardi.U.S ( 2012 : 111-121) bahwa ada beberapa masalah yang muncul terkait dengan masalah pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar, terencana, terpola, dan dapat dievaluasi oleh pendidik untuk menumbuhkan kembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Dalam tataran praktek, pelaksanaan pendidikan belum terimplementasikan secara benar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan.

Kondisi tersebut dapat dimaknai bahwa KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun pelajaran, Acuan kriteria minimal tidak dapat diubah serta merta, acuan kriteria minimal mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang sesuai

terhadap hasil penilaian yaitu melakukan layanan remedial bagi peserta didik yang belum mencapai batas KKM, dan melakukan pengayaan bagi yang sudah mencapai KKM. Target ketuntasan minimal secara nasional diharapkan mencapai nilai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria minimal di bawah target nasional kemudian meningkatkan secara bertahap.

## 2.2. Kriteria Kelulusan

Penetapan kriteria kelulusan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) ditetapkan oleh penyelenggara dengan kriteria KL UPK KKM tetapi tidak didukung dokumen penetapan dengan presentasi tingkat kelulusan ujian nasional tiga tahun terakhir 90%, hal ini sesuai dengan penelitian Sabar Budi Raharjo (2012 : 470-482 ) bahwa setiap satuan pendidikan memberikan tanggapan yang positif terhadap penerapan standar nasional pendidikan, dari delapan standar yang ada, standar yang masih rendah salah satunya adalah standar kompetensi.hal ini memiliki makna bahwa penetapan kecercapaian kompetensi peserta didik diperlukan analisis yang menyeluruh dan yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Standar kompetensi lulusan dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan dan meliputi seluruh kompetensi mata pelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang digunakan sebagai pedoman penilaian kelulusan peserta didik.

## 3. Implementasi Standar Proses.

### 3.1. Perencanaan Pembelajaran.

Komponen RPP yang disusun terdiri dari identitas mata pelajaran , SK,KD indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar,dan sumber belajar, dan RPP dikembangkan dari silabus oleh setiap tutor yang mencakup satu Kompetensi Dasar (KD) yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. sesuai dengan lampiran Permendiknas Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,Program Paket B,dan Program Paket C poin II.B tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

RPP yang disusun mencerminkan bentuk pembelajaran tatap muka saja, sehingga tidak sesuai ketentuan yaitu lampiran Permendiknas nomor 3 tahun 2008 tentang standar proses pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B dan program paket C poin II.D.2.a) dan b). Penyelenggara tidak melaksanakan pembinaan peserta didik dalam proses penerimaan dan penempatan peserta didik, melakukan orientasi peserta didik baru, memberikan layanan konseling kepada peserta didik, seperti yang tercantum pada lampiran Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 poin II. F. Hasil penelitian tersebut didukung oleh pendapat Cristhopher Lange dan Jenie Costley ( 2015: 1330-1336) yang menyatakan pentingnya memahami perbedaan cara dan konteks belajar dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Perbedaan utama antara belajar pada pendidikan formal, nonformal dan informal, perbedaan modalitas mempengaruhi cara di mana siswa dapat memperoleh keuntungan terbaik pada kesempatan berinteraksi dalam setiap setting pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya Tagreed Fathi Abu Talep (2013: 472-484) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa orang tua peserta didik mengharapkan sebuah program yang fokus utamanya adalah menumbuhkan ketrampilan sosial anak, diikuti oleh kognitif emosional dan akademik skill. Orang tua juga berharap para guru bekerja dengan kualitas yang tinggi untuk menunjukkan kesabaran, keadilan, dan kebaikan.

Makna dari kondisi tersebut adalah bahwa pengaturan pembelajaran tatap muka, tutorial, dan mandiri merupakan ciri khas layanan pendidikan nonformal yang berorientasi pada kondisi peserta didik, dimana dalam proses pembelajaran lebih menekankan pada kemandirian siswa yang harus direncanakan dengan baik oleh pendidik agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

### 3.2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Jumlah peserta didik 30 orang dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka 6 hari perminggu dan ratio buku modul 1:1 sehingga sesuai dengan lampiran Permendiknas nomor 3 tahun 2008. Tetapi pelaksanaan pembelajaran tatap muka minimal 20%, tutorial minimal 30%, dan mandiri maksimal 50% tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Aygyris Kyridis (2011:1-15) bahwa gejala meningkatnya angka dropout lebih disebabkan karena ketidak

sesuaian yang berhubungan dengan karakter sosial, hal ini berhubungan dengan karakter daerah tertentu, dengan menggunakan metode analisis hirarki disimpulkan bahwa dua penyebab utama yaitu karakter ekonomi dan karakter pendidikan.

Makna dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa pembelajaran bentuk tutorial dan mandiri dilaksanakan untuk memenuhi beban belajar bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti proses pembelajaran tatap muka. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan yang dilaksanakan untuk melayani warga masyarakat yang tidak dapat menempuh jalur pendidikan formal karena berbagai faktor antara lain : faktor ekonomi, faktor kesempatan, dan faktor sosial.

### 3.3. Pengawasan Proses Pembelajaran.

Program pemantauan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi dilaksanakan, dilaporkan, dan ditindak lanjuti tetapi tidak didukung dokumen, jadwal, dan dokumen hasil pemantauan.

Penyelenggara dan penilik pendidikan kesetaraan telah melakukan supervisi proses pembelajaran yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran, tetapi tidak ada program dan laporan hasil supervisi.

Penyelenggara telah melakukan evaluasi proses pembelajaran secara periodik dua kali setahun pada akhir semester akademik , ada program, dilaksanakan , dan ditindak lanjuti.

Persoalan di atas seperti yang disampaikan oleh Martin Gripenberg dan Emilio Jesus ( 2012: 78-83) bahwa salah satu faktor keberhasilan pendidikan di Finlandia adalah guru dan siswa diberikan keleluasaan yang sebesar-besarnya untuk mengembangkan isi pendidikan dan memilih metode. Selanjutnya jurnal G.S. Murugan (2015) bahwa melalui evaluasi yang terus menerus dan komprehensif guru dan administrator dapat menerapkan kemajuan dan prestasi belajar juga akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki masalah.

Hasil tersebut memiliki makna bahwa pengawasan proses pembelajaran yang dilakukan penyelenggara dan dinas terkait untuk menjamin bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan berjalan sesuai dengan

kaidah yang berlaku, pengawasan digunakan sebagai bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

#### 4. Implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

##### 4.1. Pendidik.

Kualifikasi pendidikan tenaga pendidik sudah memenuhi syarat tetapi kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu belum memenuhi syarat dan belum semua tenaga pendidik memiliki sertifikat pelatihan tutor. Kondisi tersebut sesuai dengan jurnal Iqbal Ahmad, Kahil Ur, dan kawan-kawan (2014:79-84) bahwa faktor yang bertanggung jawab terhadap permasalahan pendidikan adalah pengembangan profesional guru dan kurangnya guru yang berkualitas. Hal tersebut memiliki makna bahwa Peranan tenaga pendidik dalam pendidikan kesetaraan sangat penting, oleh sebab itu kualifikasi dan kompetensinya perlu standarisasi. Semangat kerja, pengabdian para tenaga kependidikan merupakan faktor yang dapat mendukung kualitas program.

##### 4.2. Tenaga Kependidikan.

Kualifikasi pendidikan pengelola telah sesuai dengan standar tenaga administrasi tetapi belum semua tenaga administrasi memiliki sertifikat pelatihan. Tenaga kependidikan yang dimiliki terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota Sesuai dengan penelitian Erik Fortanatus Asbandi (2015) yang menyatakan bahwa implementasi PP nomor 19 tahun 2005 belum optimal, faktor utamanya adalah kegagalan dalam implelementasi faktor sumberdaya yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak mencukupi, memadai, dan tidak kompeten di bidangnya. Kondisi diatas memiliki makna bahwa tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan kompetensi dalam mengelola sebuah program.

#### 5. Implementasi Standar Pengelolaan.

##### 5.1. Perencanaan Program

Memiliki visi, misi, dan tujuan program paket C yang mudah dipahami dan saling terkait satu dengan yang lainnya, dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, ditetapkan oleh rapat yang dipimpin oleh kepala SKB, dan disosialisasikan kepada satuan pendidikan dan pihak yang

berkepentingan dan memiliki dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang disetujui dalam rapat dengan memperhatikan pertimbangan dari pengelola serta pendidik, tetapi tidak disahkan oleh dinas pendidikan. Pengelola memiliki Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) yang memuat tenaga pendidik dan kependidikan, pembiayaan, dan rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu, tetapi tidak memuat peran serta masyarakat dan kemitraan dan pengelola memiliki pedoman paket C. Kondisi tersebut sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Asbandi (2012 : 1-10 ) yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah elemen penting untuk mencapai tujuan pendidikan, konsekuensinya kegiatan manajemen harus mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen secara sistematis dan sistematis.

Makna dari hal tersebut bahwa rencana kerja merupakan dasar penyelenggara dalam melaksanakan program, agar rencana kerja dapat dialisasikan pada program, diperlukan kerja sama semua pihak baik penyelenggara, pengelola, pendidik, tenaga kependidikan dan penentu kebijakan. Rencana kerja harus berisi keseluruhan isi program yang akan dilaksanakan yang mencakup komponen utama dan komponen pendukung.

## 5.2. Pengawasan

Pengawasan penyelenggaraan Paket C dilakukan oleh Ketua penyelenggara/Kepala SKB, Penilik Pendidikan Kesetaraan, Dinas Pendidikan Kabupaten yang menangani bidang PNF.

Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas public dengan melaporkan pengelolaan program kepada Dinas Pendidikan Kabupaten minimal dua kali setahun. Penyelenggara program Paket C memiliki program pengawasan pengelolaan yang meliputi : pemantauan, supervisi, dan evaluasi serta ketua penyelenggara dan penilik pendidikan kesetaraan melakukan supervisi minimal dua tahun lengkap dengan laporan dan catatan tindak lanjut.

Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiap akhir semester kepada pimpinan lembaga dan ketua program Paket C melaporkan hasil pengawasan pengelolaan secara tertulis



sekurang-kurangnya setiap akhir semester kepada pimpinan lembaga dan Dinas Pendidikan Kabupaten.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Thomas W.Valente dan kawan-kawan (2015), yang menyatakan bahwa perspektif jaringan mempengaruhi, dan mengevaluasi proses implementasi ketika sebuah program, kebijakan didesain atau di sesuaikan dengan aturan yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa jaringan kerja dapat digunakan pada setiap tahap sosial berguna untuk memonitor, mengintervensi, dan meningkatkan proses implementasi program.

Hal tersebut memiliki makna bahwa pelaksanaan evaluasi dalam sebuah program merupakan tahapan kegiatan manajemen, langkah pengawasan meliputi semua komponen yang mempengaruhi keterlaksanaan program dan melibatkan seluruh pelaksana program, hasil evaluasi harus dijadikan pedoman untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang.

#### **A. PENUTUP**

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar pengelolaan pada program Paket C setara SMA di SKB Kabupaten Karanganyar terdapat kesenjangan atau ketidaksesuaian kategori mayor yaitu pada implementasi standar isi dan standar proses. Sedangkan kesenjangan atau ketidaksesuaian kategori minor terjadi pada implementasi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar pengelolaan Selanjutnya dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut, (1) Pengelola program paket C hendaknya memperhatikan dan melaksanakan indikator-indikator pada standar nasional pendidikan, (2). Pemerintah selalu melakukan pembinaan pengelolaan program paket C secara komprehensif dan terstruktur, (3). Kepada peneliti lain diharapkan melakukan penelitian pada sasaran yang lebih luas agar dapat dijadikan pemetaan kualitas pelaksanaan program paket C.

## Daftar Pustaka

- Abu T ,Tagreed F. (2013). Requirenments Of High-Quality Kindergarden Program According To Jordanian Parents:An Exploratory Study, *Journal of Research in Chilhood Education*, 2 ( 7 ),472-484.
- Ahmad I,Rehman ur K,dkk. (2014). Critical Analysis of the Problem of Education in Pakistan : Possible Solutions, *International Journal of Education and Research in Education ( IJERES)*, 3 (2) , 79-84.
- Arikunto, S, Abdul J, Cepi S. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan*.Jakarta :PT Bumi Aksara.
- Budi, S. R. (2014). Kontribusi Delapan Standar Nasional Pendidikan Terhadap Pencapaian Prestasi Belajar, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*,.20 ( 4 ), 470-482.
- ....., (2012). Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. 16 ( 2 ),511-532.
- Fortanatus, E.S ( 2015 ). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikandi Sekolah Dasar Negeri No. 4 Pengadang,*Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, 4 (3), 1-10.
- Gripenberg,M. (2012). The Education system of Finlad and its Sucess in the PISA test. *Journal for Education Teachers and Trainers*,3, 14-24.
- Kyridis ,A. (2011). Educational Inequalities and School Dropout in Greece, *International Journal of Education*, 3 (2), 1-15.
- Longe,Cristopher,Costly Junnie. (2015). Opportunities and Lesson from Informal and Nonformal Learning : *Applicants to Online Environment*, *American Journal of Education Research*, 3 (10),1330-1336.
- Murugan, GS, (2015). Continuous and Comprehensive Evaluation- A Study, *International Multidisciplinary Research Journal*, 5 (5),1-5.
- ..... (2004). *Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* , Jakarta: Depdiknas.
- ..... (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan* ,Jakarta: Depdiknas.

- ..... (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta,: Depdiknas.
- ..... (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C*. Jakarta: Depdiknas.
- ..... (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, Jakarta: Depdiknas.
- ..... (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal*, Jakarta: Depdiknas.
- ..... (2008). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C*, Jakarta: Depdiknas.
- ..... (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C*, Jakarta: Depdiknas.
- ..... (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C*, Jakarta: Depdiknas.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Evaluasi Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Prasetyo Lis. (2009). Membangun Karakter Wirausaha Melalui Pendidikan Berbasis Nilai Dalam Program Pendidikan Non Formal, *Jurnal PNFI*, Vol. 1(1 ),1- 12.
- Sugiyono. (2013). *Metode Evaluasi kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Supardi, U.S. ( 2012 ). Arah Pendidikan Di Indonesia dalam Tataran Kebijakan Dan Implementasi, *Jurnal Formatif*” 2 (2),111-121
- Sutama, (20015). *Metode Evaluasi Pendidikan*, Surakarta : Fairus Media
- Valente, W, Thomas, Lawrence A, dkk. (2015). Social Network Analysis For Program Implementation, *Journal*.one.0131712.

- Wirawan. (2011). *Evaluasi,Teori,Model,Standar,Aplikasi,Dan Profesi*, Jakarta : PT Raja grafindo Persada.
- ,Muri. A. Y. (2015). *Asesmen Dan Evaluasi Pendidikan*,Padang : Prenadamedia;
- Yuksel, I. (2010). How to Conduct a Qualitative Program Evaluation in the Light of Eisner's Educational Connoisseurship and Criticism Model, *Turkish Journal of Qualitative Inquiry*, 1 (2), 78-83.